



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
UNIT KERJA : DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL & MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AYU MITRIA FADRI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **509598**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 302 m2/240 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 525 m2/126 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/115 m2 di KAB / KOTA KOTA BUKITTINGGI , HIBAH TANPA AKTA Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 30.500.000

1. MOTOR, HONDA NC 110 D Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA AC 52J21502 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA D1542N26L2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 8.650.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 1.944.150.000

III. HUTANG Rp. 40.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.904.150.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.